

Judul : Soal kendala syarat agunan, legislator ingin UMKM dipermudah dapat KUR
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Kendala Syarat Agunan Legislator Ingin UMKM Dipermudah Dapat KUR

FOTO: G. PRUDHO



Rycko Menoza

ANGGOTA Komisi VII DPR Rycko Menoza mendorong agar persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 100 juta dipermudah karena masih memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Terutama, persyaratan agunan atau jaminan.

Rycko sebelumnya menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian UMKM, khususnya keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta terpenuhinya sejumlah indikator kinerja. Namun, capaian administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan.

Keluhan tersebut, kata politisi Fraksi Golkar ini, ditemukan di daerah pilihannya, Lampung I. Banyak pelaku UMKM mengaku kesulitan mengakses KUR karena masih dibebani persyaratan jaminan yang tidak mudah dipenuhi.

"Saya kira ini menjadi salah satu penekanan penting dalam hasil rapat kerja sore hari ini. Saya secara khusus menekankan agar leading sector yang terkait benar-benar bisa dikedepankan," ujar Rycko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan praktik di lapangan harus segera dievaluasi. Pengawasan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pembiayaan

UMKM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rycko menegaskan, persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Perlu sinergi yang lebih kuat antara Kementerian UMKM dengan kementerian lain yang berada dalam lingkup Komisi VII DPR, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Saya kira tidak mungkin di tempat destinasi wisata tidak ada UMKM-nya. Ini kan saling berkaitan. Di dalamnya juga ada ekonomi kreatif," katanya.

Rycko menilai, pengembangan destinasi wisata nasional harus berjalan seiring dengan penguatan UMKM lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, hingga produk kreatif.

Selain itu, Rycko menyoroti pentingnya peningkatan kualitas produk UMKM. Ia berharap Kementerian UMKM tidak hanya mengejar peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memastikan produk UMKM memiliki standar mutu yang jelas.

Menurutnya, sertifikasi halal, izin edar, serta kualitas kemasan menjadi faktor penting agar produk UMKM mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. "Harapan saya, pelaku UMKM tidak hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas, termasuk standarisasi sertifikasi halal dan kemasan," tegas Rycko.

Mantan Bupati Lampung Selatan itu juga menekankan pentingnya konsistensi program Kementerian UMKM, khususnya di awal tahun 2026. Diharapkan seluruh kebijakan yang telah dirancang benar-benar dijalankan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. "Kementerian UMKM di awal tahun ini perlu konsisten. Konsisten terhadap kepentingan masyarakat dan tujuan utama pemberdayaan UMKM," ujarnya. ■ PYB